

EVALUASI KESENJANGAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN MANUSIA: STUDI KASUS IPM DAN IPG DI PROVINSI BALI TAHUN 2022

Novitasari¹, Soetji Lestari²

^{1,2}Program Studi Magister Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, Indonesia
E-mail: novitasari004@mhs.unsoed.ac.id, soetji.lestari@unsoed.ac.id

ABSTRAK

Kesenjangan gender dalam pembangunan manusia dapat berkaitan dengan perbedaan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan. Perempuan seringkali memperoleh kerugian dari perilaku laki-laki. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis evaluasi kesenjangan gender dalam pembangunan manusia: studi kasus IPM dan IPG di Provinsi Bali tahun 2022. Landasan konseptual dalam penelitian ini berdasarkan bahwa kesenjangan gender mempunyai hubungan yang secara signifikan dengan pembangunan manusia dari berbagai aspek kehidupan. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan analisis data sekunder dari buku "Pembangunan Manusia Berbasis Gender Tahun 2022" yang diterbitkan oleh KPPPA. Selain itu, penelitian ini memanfaatkan data perbandingan antara IPM dan IPG pada tingkat Nasional dan regional sebagai bentuk perbandingan. Hasil analisis menunjukkan bahwa Provinsi Bali mempunyai posisi yang lebih tinggi daripada tingkat Nasional dalam IPM dan IPG berarti adanya kemajuan dalam pembangunan manusia. Namun, pada kesenjangan gender perbandingan antara IPM dan IPG dalam tingkat regional menunjukkan bahwa lebih besar Indeks Pembangunan Gender (IPG) daripada Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Penyebab Indeks Pembangunan Manusia (IPM) rendah adalah berkaitan dengan komponen pengeluaran per kapita yang mengalami penurunan pada tahun 2021. Sedangkan, Indeks Pembangunan Gender (IPG) berkaitan dengan komponen yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan Pengeluaran Per Kapita (PPP) dengan perempuan mempunyai tingkat yang tergolong rendah daripada laki-laki. Pada analisis evaluasi kesenjangan gender antar kabupaten/kota di Provinsi Bali yaitu pada tahun 2021 tertulis IPM dan IPG terendah di Kabupaten Karangasem dan tertinggi di Kota Denpasar. Dalam hal ini perlunya strategi kebijakan pemerintah agar mengatasi kesenjangan gender dalam pembangunan manusia dan menciptakan kesetaraan gender di Provinsi Bali.

Kata Kunci: Gender; Kesenjangan; Pembangunan; Manusia

Diserahkan : 2023-02-18,
Direvisi : 2023-04-19,
Diterima : 2023-06-01,

Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial dilisensikan di bawah Lisensi 153
Creative Commons Atribusi-NonKomersial
4.0 Internasional. (CC BY-NC 4.0)



ABSTRACT

Gender gaps in human development can be related to differences that occur between men and women. Women often suffer losses from men's behavior. This research aims to analyze the evaluation of gender gaps in human development: a case study of IPM and IPG in Bali Province in 2022. The conceptual basis of this research is based on the fact that gender gaps have a significant relationship with human development from various aspects of life. This research method uses a secondary data analysis approach from the book "Gender-Based Human Development in 2022" published by KPPPA. In addition, this research utilizes comparative data between IPM and IPG at the National and regional levels as a form of comparison. The results of the analysis show that Bali Province has a higher position than the National level in IPM and IPG, meaning there is progress in human development. However, in terms of the gender gap, the comparison between IPM and IPG at the regional level shows that the Gender Development Index (IPG) is greater than the Human Development Index (IPM). The cause of the Human Development Index (IPM) is related to the per capita expenditure component which has decreased in 2021. Meanwhile, the Gender Development Index (IPG) is related to components namely Expected Years of Schooling (HLS), Average Years of Schooling (RLS), and Per Capita Expenditure (PPP) with women having a relatively lower level than men. In the evaluation analysis of gender gaps between districts/cities in Bali Province, in 2021 it was written that the lowest IPM and IPG were in Karangasem Regency and the highest in Denpasar City. In this case, there is a need for a government policy strategy to overcome the gender gap in human development and create gender equality in Bali Province.

Keywords: *Gender; Gapst; Development; Human*

PENDAHULUAN

Gender dinilai sering disamakan terkait dengan jenis kelamin, sebenarnya gender ini berbeda dengan istilah jenis kelamin. Gender menjadi suatu karakteristik yang ada dalam membedakan antara feminitas dan maskulinitas. Gender juga sering diartikan sebagai suatu pemberian atau kodrat dari Tuhan Yang Maha Esa. Gender ialah suatu perbedaan yang ada pada perempuan dan laki-laki dalam berperilaku dan nilai (Yuni Sulistyowati, 2020). Peran dari seorang perempuan dianggap sebagai pekerja domestik dalam rumah tangga dan mendidik anak, sedangkan peran dari seorang laki-laki adalah wajib untuk mencari nafkah dan memberikan keputusan dalam memimpin rumah tangga. Hal ini menimbulkan terjadinya kesenjangan gender (Bhasin, 2021).

Kesenjangan gender ialah salah satu tantangan utama pada pembangunan manusia di dunia, salah satunya adalah negara Indonesia. Negara Indonesia sering ditemukan masalah kesenjangan gender. Kesenjangan gender dapat menyebabkan potensi dari para perempuan dalam kontribusi pembangunan dinilai belum optimal pada saat ini. Kesenjangan gender dialami oleh para perempuan yang disebabkan perlakuan dari pihak para laki-laki sehingga merugikan pada pihak para perempuan (Nisarohmah dan Darmawan, 2022). Kesenjangan gender dalam berbagai bidang pembangunan dinilai masih tergolong relatif tinggi, seperti

pekerjaan, partisipasi politik, dan pendidikan, serta adanya kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang dinilai belum afektif (KPPPA, 2022).

Pada saat ini kesenjangan gender ditandai kesadaran yang dimiliki oleh masyarakat menilai bahwa kurang menganggap penting dalam hal pendidikan khususnya bagi perempuan. Cara pandang yang dimiliki oleh masyarakat menilai bahwa perempuan hanya mampu dalam mengurus kegiatan tugas untuk hal rumah tangga saja dan hanya bekerja di dalam dapur. Perilaku yang dimiliki oleh para lelaki kepada perempuan yang sering memiliki dampak merugikan (Fasawwa, dkk, 2023). Selain itu, ketika seseorang ada pada tingkat ekonomi yang rendah dan lemah dapat merugikan perempuan sehingga perlunya pemberdayaan (Mutmainnah, 2019). Dalam hal pemberdayaan perempuan dapat melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia agar perempuan dapat mendapatkan kontrol dan akses dalam berbagai bidang sehingga para perempuan mampu berpartisipasi dan berperan untuk membangun manusia yang lebih baik (Elsa, dkk, 2022). Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2022 menginformasikan bahwa jumlah penduduk Indonesia sejumlah 275,77 juta penduduk yang terdiri dari perempuan sejumlah 136,38 juta penduduk dan laki-laki sejumlah 139,39 juta penduduk (Kusnandar, 2022).

Penduduk yang mengalami kesenjangan gender, salah satunya Provinsi Bali. Meskipun, Bali dinilai telah mampu mencapai kemajuan dalam bidang pembangunan. Bali dinilai masih menghadapi dalam berbagai tantangan terkait kesenjangan gender yang mempengaruhi pada pertumbuhan manusia secara keseluruhan. Kesenjangan gender dalam partisipasi antara laki-laki dan perempuan dapat diukur dengan data capaian indeks. Ukuran tersebut terlihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG). IPM telah diperkenalkan dari tahun 1990 oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) dan mampu dipublikasikan pada laporan tahunan di *Human Development Report* (HDR) dengan secara berkala (Badan Pusat Statistik, 2022). Kesenjangan gender menjadi tantangan sosial dan pembangunan. Kesenjangan gender ini merujuk pada perbedaan yang disertai dengan akses, perlakuan, peluang, dan pengakuan antara individu berdasarkan jenis kelamin yang dapat mengakibatkan suatu ketidaksetaraan dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Fenomena tersebut tidak hanya mempunyai suatu dampak negatif bagi setiap individu yang dinilai terdiskriminasi, tetapi mampu menghambat pembangunan manusia (Iqbal, dkk, 2022).

Dalam mendukung penelitian ini terdapat beberapa jurnal penelitian yaitu pertama, penelitian yang ditulis oleh Febiola Napitupulu dan Marlina Ekawaty pada tahun 2022. Hasil penelitian menjelaskan bahwa ketimpangan gender mampu memberikan pengaruh terkait bidang ekonomi di negara Pasifik dan Asia Timur. Hal ini dibuktikan dengan perempuan merasa dirugikan oleh pihak laki-laki (Napitupulu, 2022). Kedua, penelitian yang ditulis oleh Roby Nasution dan Aisyah Fitri Yuniasih pada tahun 2022 menjelaskan bahwa kesenjangan dapat terjadi dalam pemberian upah antara gender. Pada saat pandemi terjadi kesenjangan upah yang secara terus menerus, namun setelah pandemi covid-19 stagnan dengan disebabkan oleh

diskriminasi. Maka, dalam hal ini perlunya hak dalam memperoleh kesetaraan gender (Roby Nasution & Aisyah Fitri Yuniasih, 2022). Ketiga, penelitian dari Titik Handayani pada tahun 2023 menjelaskan bahwa tingginya masalah yang terjadi pada kesenjangan gender dapat disebabkan kematian ibu yang melahirkan tergolong tinggi, partisipasi politik perempuan masih rendah, dan angkatan kerja perempuan lebih kecil daripada laki-laki. Masalah kesenjangan gender pada dasarnya disebabkan oleh akar budaya sehingga perlunya strategi dengan nilai kesetaraan dalam bidang keluarga, pendidikan, dan masyarakat dalam mengatasi kesenjangan gender (Handayani, 2023).

Kesenjangan gender dalam pembangunan manusia saat ini mampu menjadi perhatian utama. Pembangunan manusia ialah suatu konsep yang berkaitan dengan pembangunan sosial, budaya, ekonomi dari masyarakat dan setiap individu. Kesenjangan gender mampu menimbulkan suatu hambatan dalam pertumbuhan ekonomi, mengurangi suatu akses pada layanan kesehatan dan pendidikan, serta dinilai mengurangi suatu partisipasi dari perempuan dalam mengambil suatu keputusan. Meskipun saat ini, telah adanya suatu kemajuan, seperti adanya peningkatan terkait akses perempuan pada bidang pendidikan, namun masih perlu untuk diatasi. Salah satunya, perempuan yang memiliki bayaran yang tergolong rendah dan diskriminasi (Ikhsan, 2020). Pada hal ini berkaitan dengan pembangunan manusia dapat dihubungkan dengan IPM (Indeks Pembangunan Manusia) dan IPG (Indeks Pembangunan Gender) pada tahun 2021. IPM di Provinsi Bali sebesar 75,65, dan IPG sebesar 94,01. Selain itu, dapat dibandingkan dengan tingkat Nasional yaitu IPM sebesar 72,29 dan IPG sebesar 91,27. Dalam hal ini adanya perbandingan antara IPM dan IPG yaitu pertama, pada tingkat Provinsi dan Nasional tertinggi di Provinsi Bali. Kedua, antara IPM dan IPG yaitu angka jumlahnya lebih tinggi IPG (KPPPA, 2022). Melihat permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan analisis evaluasi kesenjangan gender dalam pembangunan manusia: studi kasus IPM dan IPG di Provinsi Bali tahun 2022. Tujuan dari penelitian ini yaitu menganalisis evaluasi kesenjangan gender dalam pembangunan manusia: studi kasus IPM dan IPG di Provinsi Bali tahun 2022.

KAJIAN TEORI

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori feminisme liberal. Teori feminisme liberal merupakan suatu teori yang mampu dalam menempatkan para perempuan dengan mempunyai kebebasan dari seorang individu secara penuh (Maulid, 2022). Teori ini mampu dalam mengidentifikasi kesenjangan gender dalam akses terhadap kesehatan, pendidikan, partisipasi politik, dan pekerjaan yang dapat mempengaruhi terkait IPM dan IPG. Hal ini mencakup pada penelitian ini menggunakan teori feminisme liberal yang diharapkan dapat menganalisis kesenjangan gender dalam pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan dengan lebih mendalam dan jelas, serta memunculkan kesetaraan gender dalam capaian angka IPM dan IPG.

Pada teori feminisme liberal dapat dihubungkan dengan elemen-elemen budaya dan nilai-nilai lokal yang dapat mempengaruhi kesetaraan gender di Provinsi Bali. Elemen budaya

dapat berupa pandangan terhadap suatu peran yang dimiliki oleh para perempuan dan adanya nilai lokal dalam partisipasi ekonomi yang dimiliki oleh perempuan menjadi hal yang penting. Serta, nilai budaya pada agama Hindu telah mempercayai bahwa seorang perempuan memiliki kedudukan yang terhormat. Seorang perempuan dalam budaya Bali mempunyai peran penting dalam budaya dan seni tradisional berupa musik dan tari. Kontribusi dari seni perempuan menunjukkan adanya kesetaraan gender dengan memastikan bahwa adanya imbalan dan pengakuan yang setara. Bahkan, dalam budaya Bali ditemukan adanya kegiatan musyawarah yang mampu mendorong para perempuan untuk aktif dalam hal mengikuti forum diskusi dan mampu memastikan suara dari para perempuan dapat menjadi perubahan dalam hal menuju kesetaraan gender. Selain itu, Provinsi Bali memiliki berbagai upacara adat yang dapat melibatkan para perempuan dan laki-laki, seperti upacara ngaben, upacara mepandes, upacara ngerupuk, upacara melasti, dan upacara tumpek landep. Kesempatan yang dimiliki oleh perempuan dalam berpartisipasi menunjukkan kesetaraan dalam hal kegiatan upacara secara berlangsung dan mempunyai hak yang sama dalam hal menjaga warisan budaya. Hal ini dapat menjadi cara untuk mencapai terjadinya kesetaraan gender (Rahmawati, 2016).

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini mengenai “Evaluasi Kesenjangan Gender Dalam Pembangunan Manusia: Studi Kasus IPM dan IPG di Provinsi Bali Tahun 2022” menggunakan metode penelitian deskriptif. Metode deskriptif memiliki tujuan untuk menjelaskan suatu fenomena tanpa melaksanakan manipulasi terkait variabel (Linarwati, dkk, 2016). Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis data sekunder. Data sekunder merupakan suatu data yang dapat diperoleh dari data yang telah publikasikan. Pada penelitian ini menggunakan data sekunder bersumber dari buku. Proses pengolahan data sekunder dalam penelitian ini adalah pertama, pengumpulan data yaitu data sekunder yang berasal dari buku. Buku ini berjudul *Pembangunan Manusia Berbasis Gender (PMBG) Tahun 2022*. Buku tersebut diterbitkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). Pada buku ini berisi tentang data tahun 2021 yang menjelaskan IPM dan IPG dengan dikaitkan analisis kesenjangan gender. Kedua, pengolahan awal yaitu data awal yang ada dalam buku tersebut kemudian diambil dan dapat dimasukkan ke sebuah format agar mampu diolah dalam analisis data. Ketiga, cleaning data yaitu dilaksanakan sebagai bentuk mengatasi suatu kesalahan yang ada dalam sebuah data. Keempat, konversi data yaitu data selanjutnya dilakukan konversi dalam sebuah bentuk untuk dianalisis (Sugiyono, 2011). Setelah melaksanakan hal tersebut, maka mampu menganalisis evaluasi kesenjangan gender dalam pembangunan manusia di Provinsi Bali.

PEMBAHASAN

Provinsi Bali merupakan wilayah provinsi yang ada di negara Indonesia. Ibu Kota dari Provinsi Bali adalah Kota Denpasar. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada tahun 2020

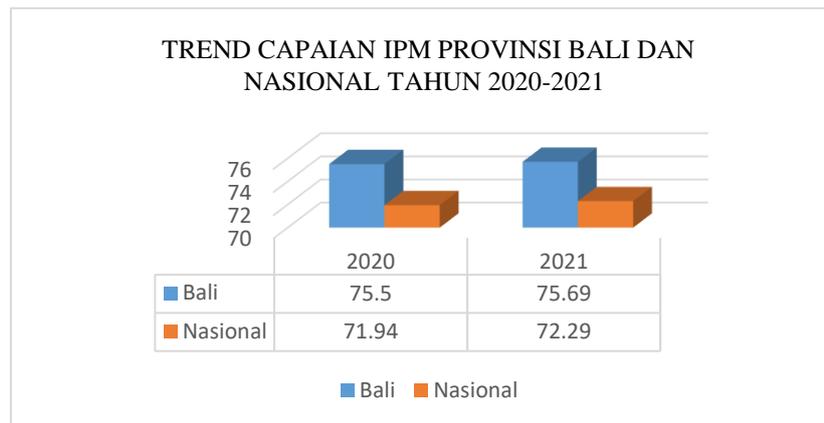
menginformasikan terdapat jumlah penduduk sebesar 4.317.404 jiwa. Bali disebut sebagai Pulau Dewata yang memiliki keindahan alam luar biasa. Mayoritas penduduk Provinsi Bali adalah beragama hindu. Selain itu, Provinsi Bali sebagai kota perekonomian dengan didasari sebagai tempat pariwisata dan adanya nilai budaya sehingga para wisatawan sangat tertarik untuk berwisata di Provinsi Bali. Nilai budaya di Provinsi Bali pada agama Hindu telah mempercayai seorang perempuan mempunyai suatu kedudukan terhormat. Dalam perempuan agama hindu di Provinsi Bali mampu menjalankan peran sebagai mitra suami dan mengurus keluarga. Disisi lain, kesenjangan gender dapat terjadi di Provinsi Bali. Kesenjangan gender ini dapat terjadi pada bidang pekerjaan, pendidikan, peran dalam keluarga, upah, dan diskriminasi. Hubungan kesenjangan gender dan pembangunan manusia tergolong berkaitan satu sama lain. Hal ini disebabkan kesenjangan gender mampu mempengaruhi aspek dari pembangunan manusia. Oleh karena itu, analisis evaluasi kesenjangan gender dalam pembangunan manusia dapat berkaitan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG).

1. Perbandingan Trend Capaian IPM dan IPG di Provinsi Bali dan Nasional

a. Trend Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Bali dan Nasional Tahun 2020-2021

Kesenjangan gender sering tidak disadari oleh manusia dan kesenjangan gender dapat terjadi dengan dalam waktu yang tergolong lama. Kesenjangan gender dalam pembangunan manusia dapat berkaitan dengan suatu perbedaan dari peluang, perlakuan, pengakuan dari jenis kelamin, dan akses. Kesenjangan gender dalam pembangunan juga perlu untuk dianalisis dengan tepat sesuai pembangunan manusia yang telah dicapai dari wilayah tersebut. Analisis kesenjangan gender dapat menganalisis terkait kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan politik melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu indikator yang tergolong penting dalam melihat suatu keberhasilan dari upaya dalam pembangunan terkait kualitas hidup dari masyarakat. Hal ini juga dapat dihubungkan melalui ukuran dari perbandingan harapan hidup, pendidikan, dan melek huruf dari wilayah, salah satunya Provinsi Bali. Untuk menjelaskan keberhasilan dalam pembangunan, maka perlu untuk mengetahui trend capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Bali dan Nasional pada tahun 2020-2021 terlebih dahulu agar mengerti capaian trend yang terjadi antara tahun 2020 dan tahun 2021. Berikut adalah gambar capaian trend IPM Provinsi Bali dan Nasional Tahun 2020-2021:



Gambar 1. Trend Capaian IPM Provinsi Bali dan Nasional Tahun 2020-2021
 Sumber: KPPPA, 2022

Berdasarkan gambar tersebut menjelaskan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Bali dan Nasional Tahun 2020-2021 menunjukkan bahwa pada tahun 2020, Provinsi Bali sebesar 75,5 dan pada tingkat nasional sebesar 71,94 yakni mengalami perbedaan sebesar 3,56. Sedangkan, pada tahun 2021 di Provinsi Bali sebesar 75,69 dan pada tingkat nasional sebesar 72,29 dengan perbedaan sebesar 3,4. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat Provinsi Bali atau regional memiliki IPM yang tinggi khususnya dalam pembangunan ekonomi dan pendidikan. Sedangkan, tingkat Nasional perlu adanya pemerataan dalam pembangunan, seperti ekonomi dan pendidikan agar lebih naik dan memunculkan pembangunan manusia yang berkualitas. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mampu digunakan sebagai perencanaan pembangunan agar pembangunan selalu mengalami kenaikan dan mutu yang tinggi.

b. Capaian Trend Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Bali dan Nasional Tahun 2017-2021

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah suatu indikator yang dapat mengukur suatu pencapaian dalam pembangunan manusia yang disertai dengan pertimbangan dalam aspek gender. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian perempuan dan laki-laki dalam berbagai aspek, seperti hidup sehat, usia, standar hidup yang layak, dan pengetahuan. Indeks Pembangunan Gender (IPG) penting untuk perencanaan pembangunan gender agar dapat meningkat (Aini, 2021). Pada IPG dapat menjadi suatu pengetahuan dalam keadaan capaian laki-laki dan perempuan, salah satunya di Provinsi Bali yang dibandingkan dengan tingkat regional dan Nasional pada tahun 2017-2021.



Gambar 2. Trend Capaian IPG Provinsi Bali dan Nasional Tahun 2017-2021

Sumber: KPPPA, 2022

Berdasarkan gambar diatas menunjukkan bahwa adanya perbandingan IPG Provinsi Bali dan Nasional pada tahun 2017-2021. Hal ini dibuktikan dengan IPG di Provinsi di Bali selalu mengalami kenaikan yaitu pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Sedangkan, IPG pada tingkat Nasional mengalami kenaikan dan penurunan. Hal ini dibuktikan dengan pada tahun 2019 IPG sebesar 91,07 turun pada tahun 2020 menjadi sebesar 91,06. Selain itu, jumlah IPG Bali dan Nasional berbeda. Hal ini menandakan bahwa kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan gender dalam tingkat Nasional masih rendah sehingga perlu untuk ditingkatkan. Peningkatan ini dapat dilakukan melalui AHH, HLS, dan rata-rata lama sekolah.

c. Perbandingan Capaian Trend IPM dan IPG di Provinsi Bali dan Nasional Tahun 2020-2021

Capaian Trend IPM dan IPG pada tahun 2020-2021 menunjukkan bahwa IPG lebih tinggi dari pada IPM dalam tingkat Nasional. Hal ini dibuktikan dengan IPG pada tahun 2021 sebesar 91,27, sedangkan IPM sebesar 72,29. Disisi lain, Provinsi Bali juga mengalami hal yang sama yaitu IPG lebih tinggi daripada IPM. Selain itu, pada perbandingan capaian IPM ditemukan bahwa perbandingan antara tingkat Provinsi Bali dan Nasional berbeda yaitu lebih tinggi Provinsi Bali dengan sebesar 75,69. Hal ini disebabkan Provinsi Bali memiliki keunggulan dalam pembangunan manusia, namun apabila dibandingkan secara Nasional yang identik dengan Provinsi-provinsi lainnya, maka hal tersebut membuat secara Nasional angkanya menjadi rendah karena setiap wilayah atau daerah memiliki capaian pembangunan manusia yang berbeda-beda. Selain itu, pada perbandingan IPG pada tahun 2021 lebih tinggi Provinsi Bali daripada Nasional. Hal ini disebabkan masyarakat di Provinsi Bali sudah mulai sadar perlunya kesetaraan gender. Kesetaraan gender dinilai penting karena terjadinya kesetaraan gender antara perempuan maupun laki-laki mampu menciptakan kehidupan yang lebih baik.

2. Kesenjangan Gender Pada IPM dan IPG Berdasarkan Komponen Pembentuknya di Provinsi Bali

Kesenjangan Gender pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Provinsi Bali adalah topik yang penting dalam memahami suatu

perbedaan antara laki-laki dan perempuan pada perkembangan manusia dan kesetaraan gender di wilayah tersebut. Data dan faktor yang mempengaruhi dalam kesenjangan gender dalam IPM dan IPG mampu menjadi suatu wawasan yang tergolong lebih mendalam. Langkah suatu kebijakan yang secara tepat mampu dalam mengurangi adanya kesenjangan gender dalam pembangunan manusia dan mendorong kesetaraan gender. Maka dalam hal ini perlu melihat secara komponen pembentuknya baik pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) maupun Indeks Pembangunan Gender (IPG).

a. IPM Berdasarkan Komponen Pembentuknya Menurut Provinsi Bali Tahun 2020-2021

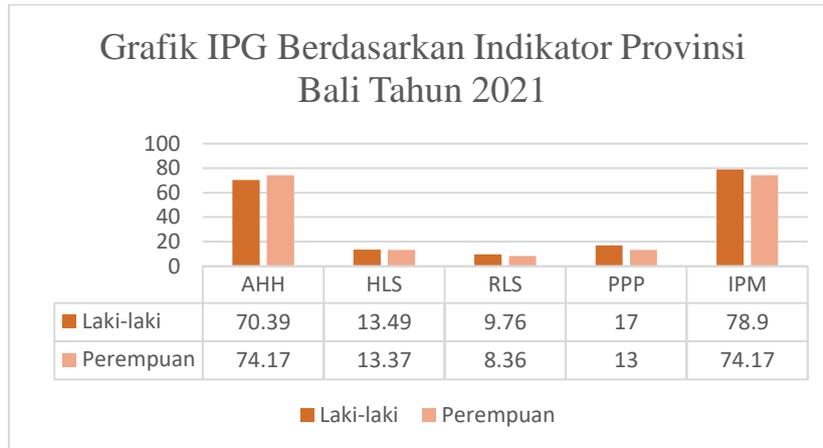
Tabel 1. IPM Berdasarkan Komponen Pembentuknya Menurut Provinsi Bali Tahun 2020-2021

IPM dan Komponen IPM	2020	2021
Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH) (Tahun)	72,13	72,24
Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,33	13,40
Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	8,95	9,06
Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (Ribu Rupiah/Orang/Tahun)	13.929	13.820
IPM	75,5	75,69

Sumber: KPPPA, 2022

Berdasarkan tabel IPM diatas dalam komponen pembentuknya pada tahun 2020-2021 di Provinsi Bali menunjukkan bahwa pada tahun 2020 ke tahun 2021 terkait Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH), harapan lama sekolah (tahun), dan rata-rata lama sekolah (tahun) mengalami kenaikan. Sedangkan, pengeluaran per kapita mengalami penurunan (ribu rupiah/orang/tahun). Hal ini disebabkan oleh turunnya pendapatan rumah tangga. Selain itu, adanya upah dari para perempuan yang tergolong rendah dan hanya diperbolehkan bekerja domestik, seperti pekerja IRT atau pembantu rumah tangga, buruh setrika, penjaga toko, dan Tenaga Kerja Wanita. Perempuan dalam partisipasi untuk bekerja masih tergolong sedikit. Oleh karena itu, pengeluaran per kapita yang dikeluarkan para perempuan menjadi lebih sedikit. Meskipun demikian, IPM Provinsi Bali pada tahun 2020 sebesar 75,5 dan mengalami kenaikan tahun 2021 sebesar 75,69.

b. IPG Berdasarkan Komponen Pembentuknya Menurut Provinsi Bali Tahun 2021



Gambar 3. IPG Berdasarkan Komponen Pembentuknya Menurut Provinsi Bali Tahun 2020-2021

Sumber: KPPPA, 2022

Berdasarkan gambar grafik diatas menunjukkan bahwa IPG dan komponen pembentuknya pada tahun 2021 di Provinsi Bali terkait Angka Harapan Hidup (AHH) laki-laki sejumlah 70,39 dan perempuan sejumlah 74,17. Hal ini berarti angka harapan hidup lebih tinggi perempuan daripada laki-laki. Faktor yang mempengaruhi angka harapan hidup adalah lingkungan, pendidikan, ketersediaan terkait pangan, dan ekonomi yang dimiliki oleh perempuan. Peningkatan terkait harapan hidup ini menunjukkan adanya hidup yang tergolong lebih baik, dan adanya perawatan dari ibu. Sedangkan, Harapan Lama Sekolah (HLS) (tahun) pada tahun 2021 yaitu pada laki-laki sebesar 13,49 dan perempuan sebesar 13,37. Hal ini berarti harapan lama sekolah tinggi laki-laki daripada perempuan. Penyebabnya adalah laki-laki lebih diprioritaskan untuk mendapatkan pendidikan. Sedangkan, perempuan untuk mendapatkan pendidikan yang tinggi masih tergolong sulit dan keluarga ada yang melarang, serta terdapat stigma di masyarakat, seperti perempuan kodratnya ada 3 M (Manak, Masak, Macak) sehingga tidak perlu untuk menempuh pendidikan yang tinggi dan perempuan hanya mengurus pekerjaan di rumah sehingga tidak memerlukan pendidikan maupun gelar.

Pada Rata-rata Lama Sekolah (RLS) yakni laki-laki sebesar 9,76 dan perempuan sebesar 8,36. Hal ini berarti adanya jumlah RLS yang lebih tinggi dimiliki oleh laki-laki. Penyebabnya adalah perempuan tidak mampu melanjutkan sekolah kembali dan ada yang tidak berkeinginan sekolah, serta adanya perempuan yang mengalami kesulitan dalam membaca dan menulis sehingga malas untuk bersekolah. Sedangkan, pada Pengeluaran per kapita (ribu rupiah orang/tahun) menunjukkan bahwa pada laki-laki sejumlah 16.925 dan perempuan sejumlah 13.346. Perbandingannya sejumlah 3.579. Hal ini disebabkan adanya pendapatan yang rendah dari perempuan, karena perempuan yang memiliki pendidikan rendah sehingga sering lebih mudah untuk memperoleh upah yang rendah. Selain itu, para perempuan hanya bisa menjual berbagai aneka sesajen untuk setiap acara agama Hindu sehingga perlu didampingi dengan

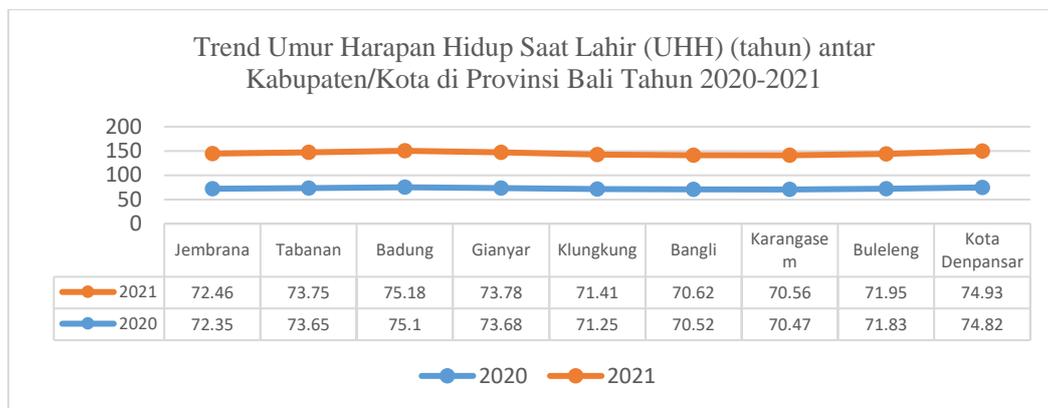
berbagai pelatihan yang dapat mendukung kenaikan upah dari perempuan Provinsi Bali. Pada IPM pada tahun 2021 yakni laki-laki sebesar 78,90 dan perempuan sebesar 74,17. Hal tersebut menunjukkan bahwa adanya kesenjangan yang terjadi pada gender dalam pembangunan manusia dengan perempuan selalu diabaikan dan kurang diperhatikan dalam ranah publik.

3. Perkembangan Capaian Pembangunan Manusia dan Gender Dalam Komponen Pembentuknya Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Bali

1. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Dalam Komponen Pembentuknya Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Bali

Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dapat dilihat melalui regional antar wilayah Kabupaten/Kota yang mengalami suatu kenaikan dalam capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Kenaikan perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) disertai dengan berbagai komponen bentuknya yaitu umur harapan hidup saat lahir (UHH) (tahun), harapan lama sekolah (tahun), rata-rata lama sekolah (tahun), dan pengeluaran per kapita yang disesuaikan (ribu rupiah/orang/tahun). Maka untuk mengetahui IPM berdasarkan komponen pembentuknya dapat dilihat dari perkembangannya terlebih dahulu dari setiap wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.

a. Trend Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH) (tahun) antar Kabupaten /Kota di Provinsi Bali Tahun 2020-2021



Gambar 4. Trend Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH) (Tahun) Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2020-2021

Sumber: KPPPA, 2022

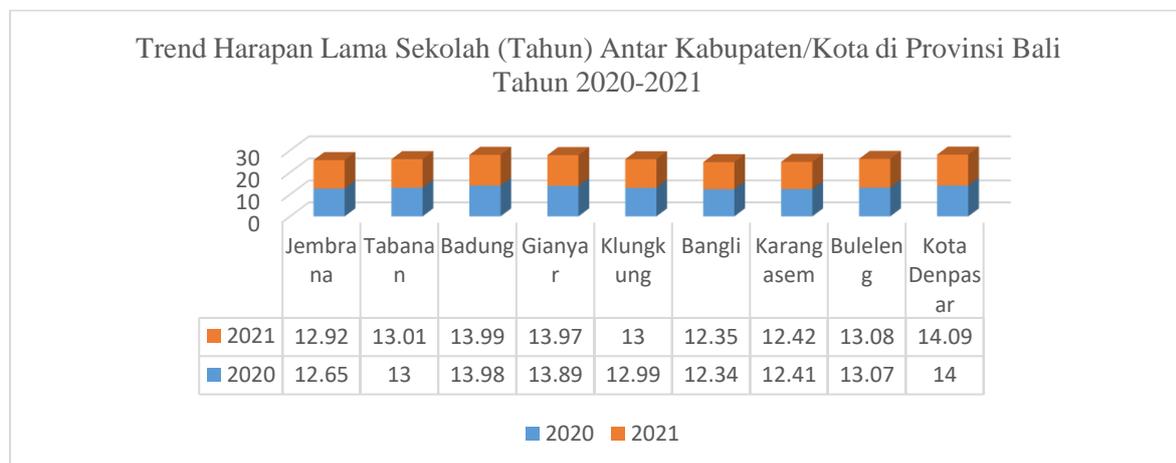
Pada gambar grafik trend umur harapan hidup saat lahir (UHH) (tahun) antar kabupaten/kota di Provinsi Bali Tahun 2020-2021 menunjukkan bahwa Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH) pada setiap tahun dari setiap kabupaten dan kota mengalami kenaikan dan membaik. UHH ialah suatu rata-rata tambahan pada umur seseorang yang diharapkan dapat terus hidup. Umur Harapan Hidup saat lahir dapat mencerminkan terkait kondisi dalam kesehatan. Perhitungan UHH dapat didasarkan pada angka kematian berdasarkan umur. Selain



itu, pengukuran UHH tersebut dapat menjadi alat bagi pemerintah dalam mengevaluasi kinerja dari pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan bagi masyarakat.

Berdasarkan grafik tersebut mampu menyimpulkan bahwa UHH tertinggi pada tahun 2021 ada di Kabupaten Badung sebesar 75,18, dan UHH terendah ada di Kabupaten Karangasem sebesar 70,56. Pada daerah yang UHHnya tinggi yakni di Kabupaten Badung berarti daerah tersebut menunjukkan memiliki kecukupan gizi, program kesehatan, dan pembangunan kesehatan yang baik khususnya bagi para perempuan yang sedang hamil agar dapat melahirkan anak yang sehat. Pembangunan kesehatan yakni Rumah Sakit dan Puskesmas disertai dengan fasilitas kesehatan yang lengkap dan baik. Sedangkan, rendahnya UHH yakni di Kabupaten Karangasem disebabkan adanya gizi yang rendah dan masyarakat Kabupaten Karangasem yang memiliki pendapat rendah sehingga tidak mampu membeli berbagai makanan dan minuman yang memiliki kadar protein dan gizi yang tinggi. Selain itu, kurangnya pemahaman maupun pengetahuan bagi para ibu yang hamil tentang mpasi dan pemberian asi secara eksklusif. Pemberian mpasi sering diberikan sebelum waktunya. Serta, adanya kurangnya pengetahuan gizi, pola asuh, dan kebersihan diri yang tergolong kurang, seperti minimnya cuci tangan yang dilakukan oleh para perempuan di Kabupaten Karangasem (Dinas Lubis, dkk, 2020). Oleh karena itu, perlunya pemerintah dalam perbaikan kualitas kondisi sosial dan kesehatan dari masyarakat sehingga diharapkan Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH) mampu meningkat.

b. Trend Harapan Lama Sekolah (Tahun) Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2020-2021



Gambar 5. Trend Harapan Lama Sekolah (Tahun) Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2020-2021

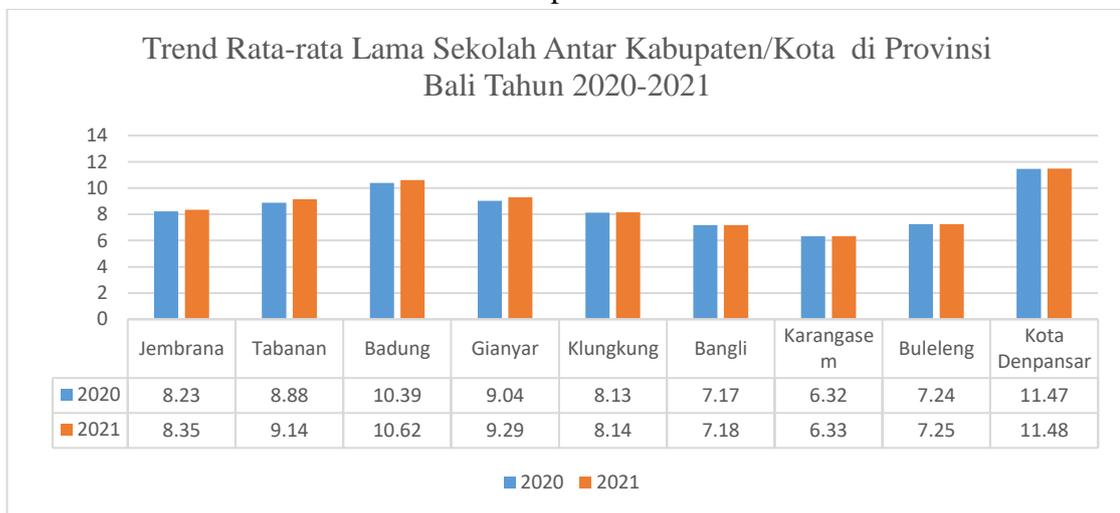
Sumber: KPPPA, 2022

Berdasarkan gambar tersebut menunjukkan bahwa trend harapan lama sekolah (tahun) antar Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2020-2021 yaitu setiap daerah Kabupaten/Kota



di Provinsi Bali mengalami kenaikan dalam trend harapan lama sekolah (tahun). Meskipun, kenaikannya tidak terlalu besar tetapi dalam perkembangannya Harapan Lama Sekolah (HLS) tetap mengalami kenaikan dan terus membaik. Harapan Lama Sekolah (HLS) merupakan lamanya anak sekolah dalam tahun yang diharapkan mampu dialami oleh para anak dengan umur tertentu. Hal ini menunjukkan Harapan Lama Sekolah (HLS) sebagai indikator yang penting karena sama dengan peluang dari penduduk yang bersekolah. Penghitungan ini dimulai dari penduduk yang usianya 7 tahun ke atas yang sekolah. Kenaikan yang terjadi pada setiap Kabupaten maupun kota di Provinsi Bali menjelaskan bahwa kualitas pendidikan bagi setiap gender di daerah sudah mulai meningkat, salah satunya di Kota Denpasar pada tahun 2021 sebesar 14,09. Perempuan di Kota Denpasar pada saat ini telah mampu diberikan akses dalam pendidikan hingga memperoleh pendidikan di Perguruan Tinggi, serta guru sekarang lebih mayoritas ialah seorang perempuan.

c. Trend Rata-rata Lama Sekolah Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2020-2021



Gambar 6. Trend Rata-rata Lama Sekolah Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2020-2021

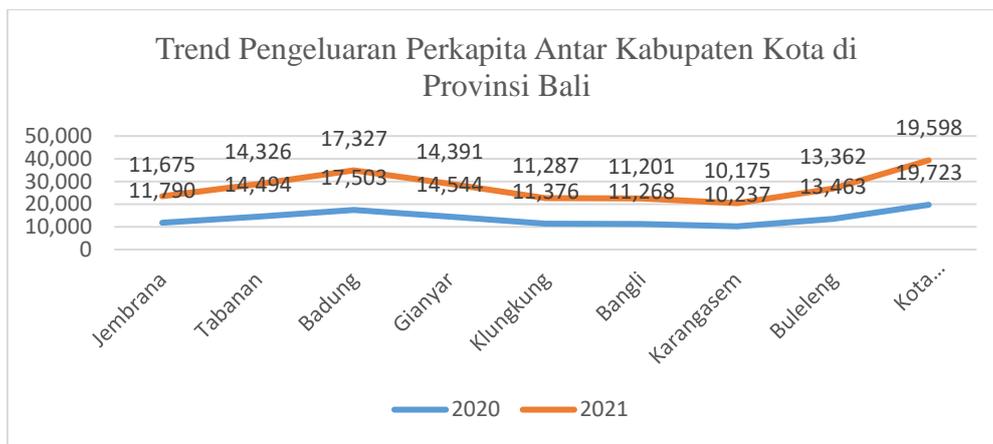
Sumber: KPPPA, 2022

Berdasarkan gambar grafik diatas terkait trend rata-rata lama sekolah antar kabupaten/kota di Provinsi Bali Tahun 2020-2021 menunjukkan bahwa wilayah kabupaten/kota memiliki kenaikan secara signifikan dalam rata-rata lama sekolah. Hal ini dibuktikan dengan berbagai wilayah mulai dari Kabupaten Jembrana sampai Kota Denpasar pada tahun 2020 mengalami kenaikan, salah satunya Kabupaten Jembrana yang awalnya pada tahun 2020 sebesar 8,23, kemudian pada tahun 2021 sebesar 8,35 dan disusul dengan wilayah yang lainnya. Trend ini berarti sukses karena selalu mengalami kenaikan.

Rata-rata Lama Sekolah ialah suatu rata-rata dengan disertai jumlah tahun yang telah ditempuh para penduduk yang umurnya 15 tahun ke atas. Penduduk tersebut menempuh seluruh jenis jenjang pendidikan. Penduduk yang tamat Sekolah Dasar (SD) dihitung 6 tahun,

SMP sampai tamat dihitung selama 12 tahun tanpa menghitung seorang anak tinggal dikelas maupun tidak. Kemudian dilanjutkan ke jenjang SMA dan seterusnya. Kenaikan dalam rata-rata lama sekolah, seperti Kota Denpasar dapat menjadi contoh di Provinsi Bali, karena semua gender yakni perempuan dan laki-laki telah mampu sekolah hingga tamat dan sesuai dengan usia, serta pembangunan pendidikan di Kota Denpasar yang baik yang dimulai dari tingkat Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Perguruan Tinggi sehingga dapat meningkatkan IPM Provinsi Bali.

d. Trend Pengeluaran Per Kapita Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2020-2021



Gambar 7. Trend Pengeluaran Per Kapita Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2020-2021

Sumber: KPPPA, 2022

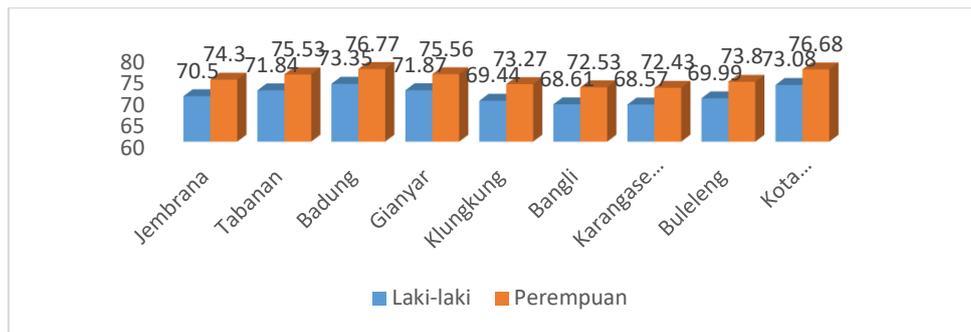
Berdasarkan grafik terkait IPM tentang trend pengeluaran per kapita antar Kabupaten kota di Provinsi Bali mengalami penurunan dari tahun 2020 ke tahun 2021. Hal ini dibuktikan dengan melalui data tersebut Kabupaten Jembrana pada tahun 2020 sejumlah 11.790 kemudian pada tahun 2021 menjadi sejumlah 11.675, Kabupaten Tabanan pada tahun 2020 sejumlah 14.494, kemudian pada tahun 2021 menjadi sejumlah 14.326, Kabupaten Badung pada tahun 2020 sejumlah 17.503, kemudian pada tahun 2021 sejumlah 17.327, Kabupaten Gianyar pada tahun 2020 sejumlah 14.544, kemudian pada tahun 2021 menjadi 14.391, Kabupaten Klungkung pada tahun 2020 sejumlah 11.376, kemudian pada tahun 2021 sejumlah 11.287, Kabupaten Bangli pada tahun 2020 sejumlah 11.268 dan pada tahun 2021 menjadi 11.201, Kabupaten Karangasem pada tahun 2020 sejumlah 10.237 dan pada tahun 2021 menjadi 10.175, Kabupaten Buleleng pada tahun 2020 sejumlah 13.463, dan Kota Denpasar pada tahun 2020 sejumlah 19.723 dan pada tahun 2021 menjadi sejumlah 19.598. Hal ini disebabkan menurunnya pendapatan rumah tangga yang didapatkan oleh setiap keluarga dalam kehidupan sehari-hari. Pembangunan ekonomi harus ditingkatkan kembali khususnya bagi perempuan agar memperoleh upah yang lebih tinggi. Wilayah yang pengeluaran per kapita tertinggi di

Kota Denpasar dan terendah di Kabupaten Karangasem. Selain itu, pada tahun 2020-2021 terjadinya covid-19 yang mampu mempengaruhi kehidupan masyarakat di Provinsi Bali, khususnya dalam bidang ekonomi. Pada masa tersebut, masyarakat harus di rumah dan adanya lockdown, serta terhindar dari keramaian sehingga masyarakat kesulitan dalam mendapatkan pendapatan yang berguna dalam memenuhi kehidupan sehari-hari.

2. Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Dalam Komponen Pembentuknya Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Bali

Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) pada tahun 2017 sampai 2021 selalu mengalami kenaikan di seluruh kabupaten atau kota di Provinsi Bali. Perkembangan IPG berkaitan dengan trend angka pada umur harapan hidup (AHH), standar hidup, dan tingkat pendidikannya selalu mengalami kenaikan. Setiap masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Bali sudah mulai aktif dalam peningkatan pembangunan gender. Hal ini dapat dilihat melalui IPG dalam komponen pembentuknya sebagai berikut:

a. Trend Angka Harapan Hidup (AHH) (tahun) Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2021

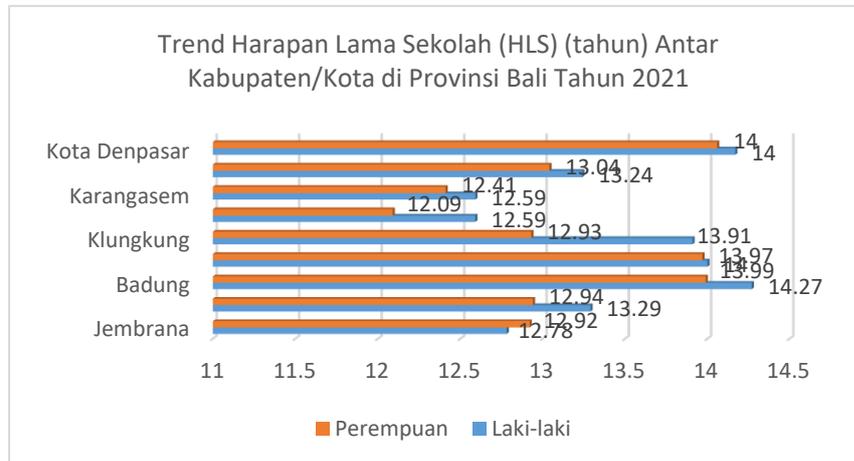


Gambar 8. Trend Angka Harapan Hidup (AHH) Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Bali
Sumber: KPPPA, 2022

Berdasarkan grafik diatas menunjukkan bahwa adanya angka trend angka harapan hidup (AHH) antar Kabupaten/Kota tahun 2021 yaitu Kabupaten Badung memiliki Angka Harapan Hidup (AHH) pada laki-laki sebesar 73,35 dan perempuan sebesar 76,77 yang tergolong tinggi daripada kabupaten/kota yang lainnya. Sedangkan, Angka Harapan Hidup (AHH) yang terendah ada di Kabupaten Karangasem yaitu laki-laki sebesar 68,57 dan perempuan sebesar 72,43. Perbedaan Angka Harapan Hidup (AHH) dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kondisi ekonomi, tingkat pendidikan, dan tingkat pendapatan. Ketika tingkat ekonomi dan pendapatan masyarakat termasuk tinggi, maka mendorong masyarakat dalam meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik, seperti salah satunya seseorang ketika mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi maupun ekonomi yang tinggi akan mampu melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dengan menempuh pendidikan S2 dan menyekolahkan anggota keluarganya ke jenjang yang lebih tinggi kembali. Namun, ketika tingkat ekonomi dan pendapatan rendah

berarti kualitas hidupnya belum baik dan anggota keluarga maupun dirinya masih belum mampu mendaoatkan pendidikan yang lebih baik.

b. Trend Harapan Lama Sekolah (HLS) (tahun) Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun2021



Gambar 8. Trend Angka Harapan Lama Sekolah Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2021

Sumber: KPPPA, 2022

Berdasarkan gambar grafik diatas menunjukan bahwa trend harapan lama sekolah antar Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2021 yaitu Kabupaten Bangli memiliki harapan lama sekolah tergolong rendah daripada kabupaten maupun kota yang lainnya. Hal ini ditandai dengan laki-laki sebesar 12,59 dan perempuan sebesar 12,09. Sedangkan, Kabupaten Badung memiliki harapan lama sekolah yang tinggi dibuktikan dengan laki-laki sebesar 14,27 dan perempuan sebesar 13,99. Oleh karena itu, perlunya peningkatan dalam harapan lama sekolah agar masyarakat dapat memiliki pengetahuan terutama para perempuan dan perlunya peningkatan kondisi pembangunan sistem pendidikan di setiap jenjang.

c. Trend Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2021

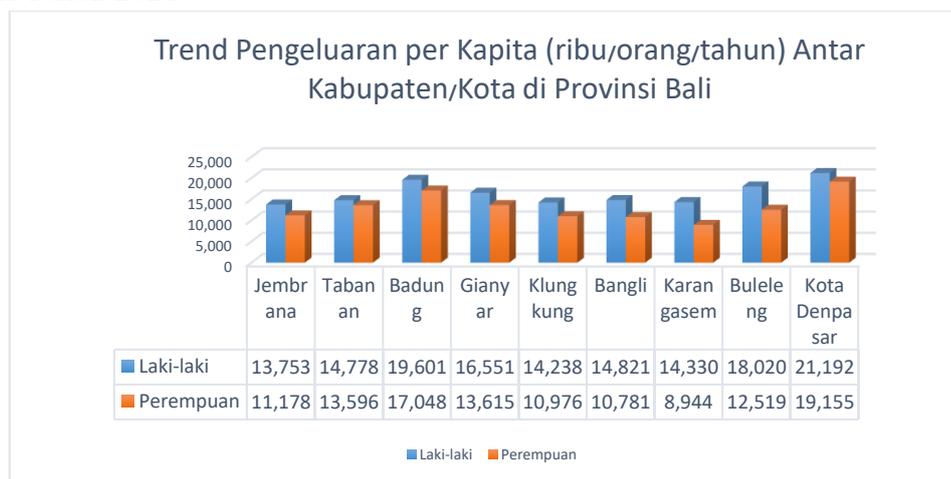


Gambar 9. Trend Rata-rata Lama Sekolah Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2021

Sumber: KPPPA, 2022

Berdasarkan gambar diatas menunjukkan bahwa adanya rata-rata lama sekolah (RLS) antar kabupaten/Kota di Provinsi Bali pada tahun 2021. Data tersebut memperlihatkan bahwa adanya grafik naik turun dari Kabupaten Jembrana sampai dengan Kota Denpasar. Angka rata-rata lama sekolah (RLS) tertinggi yaitu di Kota Denpasar dengan laki-laki sebesar 11,88 dan perempuan sebesar 11,14. Sedangkan, angka rata-rata sekolah (RLS) terendah yaitu di Kabupaten Karangasem dengan laki-laki sebesar 7,36 dan perempuan sebesar 5,29. Perbedaan jumlah tinggi rendahnya karena masyarakat yang berusia diatas dari 15 tahun untuk menempuh dalam pendidikan sudah dijalankan. Selain itu, perbedaan rata-rata lama sekolah dari laki-laki dan perempuan karena laki-laki didukung dengan lingkungan karena adanya stigma sebagai pencari nafkah sehingga harus memiliki pendidikan yang lebih tinggi daripada perempuan. Perempuan diperbolehkan hanya bekerja di dalam domestik sehingga pendidikan yang diterima perempuan lebih rendah daripada laki-laki. Selain itu, perempuan hanya diperbolehkan di rumah saja dan dilarang untuk mendapatkan pendidikan yang tinggi.

d. Trend Pengeluaran per Kapita (ribu rupiah/orang/tahun) Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2021



Gambar 10. Trend Pengeluaran per Kapita (ribu rupiah/orang/tahun) Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2021

Sumber: KPPPA, 2022

Berdasarkan data grafik tersebut menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pengeluaran per kapita antar Kabupaten/Kota di Provinsi Bali pada tahun 2021. Hal ini dibuktikan dengan Kota Denpasar menempati pengeluaran per kapita tertinggi, baik dari laki-laki sebesar 21.192 dan perempuan sebesar 19.155. Perbedaan pengeluaran antara laki-laki dan perempuan tersebut sejumlah 2.037. Meskipun terdapat perbedaan tersebut, Kota Denpasar tetap memiliki posisi tertinggi daripada Kabupaten lainnya karena hasil dari pendapatan laki-laki dan perempuan yang tinggi dan wilayah tersebut menjadi pusat dalam hal perekonomian dari Provinsi Bali. Selain itu, ada Kabupaten Karangasem memiliki perbedaan yang lumayan jauh antara laki-laki dan perempuan dalam pengeluaran per kapita daripada kabupaten maupun kota lainnya. Hal ini dibuktikan dengan laki-laki mendapatkan sebesar 14.330 dan perempuan sebesar 8.944.

Perbedaannya adalah 5.386. Perbedaan pengeluaran per kapita menunjukkan adanya kesenjangan gender dalam pemberian upah pada suatu pekerjaan. Upah yang diberikan perempuan tergolong lebih rendah daripada laki-laki. Oleh karena itu, harus disertai peran pemerintah agar perempuan mendapatkan pendapatan yang tinggi (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2022).

4. Evaluasi Kesenjangan Gender Dalam Pembangunan Manusia di Provinsi Bali

Kesenjangan gender dalam pembangunan manusia menunjukkan adanya ketidaksetaraan maupun perbedaan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan. Faktor yang mempengaruhi kesenjangan gender adalah pertama, budaya dan norma sosial yaitu adanya perbedaan dalam tanggung jawab dan peran dari perempuan dan laki-laki di lingkungan masyarakat sehingga menimbulkan kesenjangan gender, sedangkan norma sosial mampu membatasi para perempuan dalam partisipasi politik, pekerjaan, dan pendidikan. Kedua, pendidikan adalah terdapat ketimpangan sebagian para perempuan karena tidak diperbolehkan untuk memperoleh pendidikan yang baik. Pendidikan hanya ditunjukkan kepada pihak laki-laki karena laki-laki dianggap pencari nafkah sehingga wajib untuk mendapatkan pendidikan tinggi. Ketika laki-laki mendapatkan pendidikan tinggi akan dianggap mampu mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dengan disertai upah yang tinggi sehingga mampu mencukupi kebutuhan keluarga. Ketiga, ekonomi yaitu adanya kesenjangan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan dengan ditandai peluang pekerjaan yang berbeda dan upah yang diberikan kepada perempuan lebih rendah. Laki-laki dianggap kuat dan kerja keras sehingga sering dianggap mampu bekerja lebih giat sehingga mendapatkan upah yang tinggi. Sedangkan, perempuan hanya dianggap lemah dan hanya mampu bekerja dalam domestik, seperti menjadi buruh setrika dan IRT. Keempat, kesehatan yaitu ketika pada saat perempuan tidak mempunyai akses dalam pelayanan kesehatan sehingga risiko kesehatan dapat rendah. Seperti, minimnya pengetahuan ibu hamil tentang gizi dan mpasi. Kelima, partisipasi politik yaitu ketika perempuan tidak dapat mewakili dalam posisi politik sehingga perspektif dan kebutuhan perempuan dapat terabaikan. Selain itu, kuota perempuan di Indonesia 30% harus mampu dipenuhi sehingga perlunya peningkatan partisipasi politik bagi perempuan agar mampu terjun dalam bidang politik, seperti menjadi Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Gubernur, Wali Kota, dan Bupati.

Perempuan memiliki peran yang sangat penting dalam peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG). Ketika perempuan memiliki kesempatan dalam menjalankan komponen dari setiap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG). Hal ini akan menimbulkan trend capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang tinggi. Selain itu, perempuan dapat menjadi esensi dari pembangunan manusia sehingga tidak hanya laki-laki yang mampu dalam berkontribusi maupun esensi dari pembangunan manusia. Ketika perempuan sudah mampu berkontribusi dalam berbagai hal, seperti partisipasi politik, pendidikan, dan lainnya sehingga kesenjangan gender dapat terimimalisir.

Kesenjangan gender dapat dilihat melalui perspektif teori feminisme liberal. Pada teori ini menekankan pada pentingnya kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan tersebut menjadi awal dalam mengatasi terjadinya kesenjangan gender, khususnya di Provinsi Bali. Upaya kesetaraan gender difokuskan pada perubahan kebijakan dan hukum yang mampu mendukung hak yang dimiliki oleh seorang perempuan. Kesenjangan gender ini dapat dibuktikan dengan seorang perempuan sebagai seorang angkatan kerja yang tidak memperoleh upah yang tinggi melainkan upah yang murah dan posisi perempuan selalu dibawah laki-laki. Selain itu, perbedaan trend capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Provinsi Bali yang mengalami naik dan turun dari tahun ke tahun. Dalam hal tersebut, dibuktikan dengan trend capaian IPM dan IPG tertinggi berada di Kota Denpasar dan terendah di Kabupaten Karangasem. Oleh karena itu, perlunya peran pemerintah, perusahaan maupun swasta, dan masyarakat memberikan dukungan agar terjadi kesetaraan gender dan menghilangkan kesenjangan gender yang ada di Indonesia, khususnya di Provinsi Bali. Hal ini dapat dilakukan dengan melalui pelatihan kerja bagi para perempuan, pengetahuan kesehatan dan gizi, peningkatan fasilitas kesehatan, perlindungan sosial pada perempuan, serta pendidikan bagi perempuan.

KESIMPULAN

Pada perbandingan trend capaian IPM dan IPG di Provinsi Bali dan Nasional tergolong berbeda. Hal ini ditandai dengan pada tahun 2021 capaian trend IPG lebih tinggi daripada IPM baik dari tingkat regional dan Nasional. Kesenjangan Gender pada IPM dan IPG berdasarkan pembentuknya di Provinsi Bali yaitu melihat bahwa pada IPM terjadinya kesenjangan khususnya dari komponen pengeluaran per kapita disesuaikan (ribu rupiah/orang/tahun), sedangkan pada IPG terjadi kesenjangan dari komponen pada harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, pengeluaran per kapita, dan IPM. Perkembangan capaian pembangunan gender dalam komponen pembentuknya antar Kabupaten/Kota di Provinsi Bali dilihat dari IPM dan IPG pada pembangunan manusia. Pada tahun 2021 angka IPM tertinggi berada di Kota Denpasar sebesar 84,03 dengan terdiri dari laki-laki sebesar 85,66 dan perempuan sebesar 82,99. IPM terendah di Kabupaten Karangasem sebesar 67,36 dengan terdiri dari laki-laki sebesar 72,39 dan perempuan 64,40. Sedangkan, IPG tertinggi berada di Kota Denpasar sebesar 96,88 dan terendah di Kabupaten Karangasem sebesar 88,96. Hal ini disebabkan adanya kesenjangan gender pada perempuan dalam pembangunan manusia di Provinsi Bali yang dihubungkan dengan berbagai faktor, seperti budaya, norma sosial, pendidikan, kesehatan, partisipasi ekonomi, kesehatan, dan partisipasi politik. Oleh karena itu, perlunya peran dari pemerintah, swasta, perusahaan, dan masyarakat dalam mengatasi kesenjangan gender dalam pembangunan manusia yaitu meningkatkan pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan partisipasi politik, serta perlu partisipasi perempuan dan perlindungan di dunia kerja dan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Afrilia Nur Aini. (2021). Analisis Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota/Kabupaten di

- Provinsi Jawa Timur Tahun 2017-2019. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 16(1), 77–91.
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Indeks Pembangunan Manusia*. <https://www.bps.go.id/subject/26/indeks-pembangunan-manusia.html>, diakses 9 Oktober 2023.
- Bhasin, K. (2021). *Memahami Gender*. Jakarta: Teplok Press.
- Dinas Lubis, Dewa AyuMirah Ardini, Ketut Sutiyari, K. T. A. (2020). *Potret Permasalahan Gizi di Desa Ban, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, Bali*. Bali: Udayana Press.
- Elsa, Dian Febriyani, Ma'mun Nawawi, dan S. R. (2022). Pemberdayaan Perempuan Dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif Pedesaan. *Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan, dan Kebudayaan*, 23(2).
- Febiola Napitupulu, M. E. (2022). Ketimpangan Gender dan Pertumbuhan Ekonomi: Studi Kasus Pada Negara-Negara Asia Timur dan Pasifik. *Journal of Development Economic and Social Studies*, 1(1), 29–43.
- Ikhsan, U. H. dan. (2020). Pembangunan Manusia, Ketimpangan Gender Dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan*, 5(1).
- Indonesia, K. P. P. dan P. A. R. (2022). *Menteri PPPA: Hapuskan Kesenjangan Gender di Lingkungan Kerja*. <https://www.kemennppa.go.id/index.php/page/read/29/3974/menteri-pppa-hapuskan-kesenjangan-gender-di-lingkungan-kerja/hhoig/k850494.html>, diakses 9 Oktober 2023.
- Indonesia, K. P. P. dan P. A. R. (2022). *Pembangunan Manusia Berbasis Gender Tahun 2022*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (Kemen PPPA).
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2022). *Pembangunan Manusia Berbasis Gender Tahun 2022*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (Kemen PPPA).
- Lutfiana Nisarohmah dan Dadang Darmawan. (2022). Analisis Kesenjangan Gender Dalam Bidang Pekerjaan Pada Era Kontemporer. *Gunung Djati Conference Series*, 8(1), 113–120.
- Mega Linarwati, Azis Fathoni, dan M. M. M. (2016). Studi Deskriptif Pelatihan Dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Serta Penggunaan Metode Behavioral Event Interview Dalam Merekrut Karyawan Baru Di Bank Mega Cabang Kudus. *Journal of Management*, 2(2), 1–8.
- Muhammad Falih Iqbal dan Sugeng Harianto. (2022). Prasangka, Ketidaksetaraan, dan Diskriminasi Gender Dalam Kehidupan Mahasiswa Kota Surabaya: Tinjauan Pemikiran Konflik Karl Marx. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 8(2).
- Mutmainnah. (2019). Kesenjangan Gender Ditinjau Dari Perspektif Islam. *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 5(1).
- Ni Nyoman Rahmawati. (2016). Perempuan Bali Dalam Pergaulan Gender (Kajian Budaya, Tradisi, dan Agama Hindu). *Jurnal Studi Kultural*, 1(1), 58–64.
- Pijar Maulid. (2022). Analisis Feminisme Liberal Terhadap Konsep Pendidikan Perempuan (Studi Komparatif antara Pemikiran Dewi Sartika dan Rahmah El-Yunusiyah). *Jurnal Riset Agama*, 2(2), 602–631.
- Roby Nasution & Aisyah Fitri Yuniasih. (2022). Analisis Kesenjangan Upah Antargender di Kawasan Timur Indonesia Pada Masa Sebelum dan Saat Pandemi. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 13(2), 187–204.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif dan*

R&D. Bandung: Alfabeta.

Syaima Sabine Fasawwa dan Farida Hanum. (2023). Perspektif Gender Penyelenggaraan Pendidikan Di Sekolah Gajahwong Yogyakarta. *Jurnal Kajian Sosiologi*, 12(1), 31–39.

Titik Handayani. (2023). Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Isu Kesenjangan Gender di Indonesia. *Jurnal Kependudukan dan Pembangunan Berkelanjutan*, 1(1), 13–32.

Yuni Sulistyowati. (2020). Kesetaraan Gender Dalam Lingkup Pendidikan Dan Tata Sosial. *Indonesian Journal of Gender Studies*, 1(2), 1–14.